

EVALUASI PROGRAM BANTUAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

Rosanda Nur Dwitara

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
Kalimantan Selatan

E-mail: *ocha5lima@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat dalam membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi, mengurangi biaya usaha tani, dan mendukung kegiatan pertanian. Namun, pelaksanaan belum optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran dan kuota, keterlambatan penyaluran, distribusi yang belum merata, serta sebagian petani belum memahami prosedur pengajuan bantuan. Diperlukan peningkatan dukungan anggaran, perbaikan distribusi, sosialisasi, dan pendampingan agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Evaluasi Kebijakan, Bantuan Pertanian, Sarana Produksi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Agricultural Production Facilities Assistance Program at the Food Security, Agriculture and Fisheries Office of Balangan Regency based on William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, while also identifying implementation constraints. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the program has been implemented fairly well and provides benefits by helping farmers meet production facility needs, reducing farming costs, and supporting agricultural activities. However, implementation is not yet optimal due to limited budgets and quotas, delays in distribution, uneven distribution, and limited understanding among some farmers regarding application procedures. Increased budget support, improved distribution, stronger socialization, and assistance are needed to make the program more targeted and sustainable.

Keywords

Policy Evaluation, Agricultural Assistance, Production Facilities

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, terutama di wilayah perdesaan. Pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama kegiatan usaha tani. Karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan (Todaro & Smith, 2015). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik perlu dilaksanakan dan dievaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat

tercapai secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Arifin, 2018; Nugroho, 2017). Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam sektor pertanian adalah program bantuan sarana produksi pertanian bagi petani.

Sarana produksi pertanian merupakan berbagai input yang digunakan dalam kegiatan usaha tani, seperti benih, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian. Ketersediaan sarana produksi yang memadai dapat membantu petani menjalankan kegiatan budidaya, mengurangi beban biaya, dan mendukung produktivitas. Program bantuan pemerintah karena itu diharapkan dapat membantu petani yang menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan usaha taninya. Kebijakan pembangunan pertanian juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sektor pertanian di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk bidang pertanian. Dalam konteks Kabupaten Balangan, pelaksanaan kebijakan tersebut salah satunya dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.

Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian dilaksanakan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani serta mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaannya, program masih menghadapi beberapa persoalan, antara lain keterbatasan jumlah bantuan, distribusi yang belum merata, keterlambatan penyaluran, serta adanya bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk melihat pelaksanaan Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian secara menyeluruh, termasuk manfaat yang diterima petani dan kendala yang muncul selama pelaksanaan program (Dunn, 2003; Dunn, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian serta kondisi yang memengaruhi keberhasilan program di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan pada Maret sampai Mei 2026. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan jumlah 7 orang, terdiri atas 1 Kepala Bidang Pertanian, 1 staf bidang pertanian, 2 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), 1 ketua kelompok tani, dan 2 petani penerima bantuan. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam program, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi dengan membandingkan informasi dari sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dianalisis berdasarkan enam kriteria evaluasi

kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi petani, tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya lebih optimal.

3.1 Efektivitas

Program bantuan sarana produksi pertanian dinilai efektif karena mampu membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani melalui bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Bantuan tersebut membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung petani dan mendukung kegiatan budidaya. Temuan ini menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kriteria Dunn, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Dunn, 2018).

3.2 Efisiensi

Dari aspek efisiensi, penyaluran bantuan dilakukan melalui kelompok tani yang memenuhi persyaratan administrasi serta melalui proses verifikasi oleh dinas dan penyuluh pertanian. Mekanisme tersebut membuat distribusi bantuan lebih terarah. Namun, pelaksanaan masih menghadapi keterlambatan akibat proses administrasi dan mekanisme pengadaan yang membutuhkan waktu. Dengan demikian, program cukup efisien dalam pemanfaatan sumber daya, tetapi ketepatan waktu penyaluran masih perlu ditingkatkan.

3.3 Kecukupan

Bantuan yang diberikan telah membantu mengurangi beban petani, tetapi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sarana produksi. Jumlah bantuan yang tersedia masih lebih kecil dibandingkan kebutuhan petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa program mampu mengurangi sebagian permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran, tetapi belum dapat menyelesaikannya secara menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan kriteria kecukupan Dunn yang menilai kemampuan kebijakan dalam memenuhi atau mengatasi kebutuhan masyarakat.

3.4 Pemerataan

Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku melalui kelompok tani yang terdaftar dan memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, keterbatasan kuota dan anggaran menyebabkan masih terdapat petani atau kelompok tani yang belum memperoleh bantuan. Dengan demikian, aspek pemerataan belum sepenuhnya tercapai karena manfaat program belum dapat dirasakan oleh seluruh petani yang membutuhkan.

3.5 Responsivitas

Komunikasi antara petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pihak dinas berjalan cukup baik. Keluhan dan masukan petani dapat disampaikan melalui penyuluh untuk diteruskan kepada dinas. Penyuluh juga memberikan pendampingan dan informasi terkait pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana program cukup responsif dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan kelompok sasaran.

3.6 Ketepatan

Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memenuhi kriteria penerima dan telah melalui proses verifikasi. Jenis bantuan berupa benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya dinilai sesuai dengan kebutuhan usaha tani yang dijalankan. Dengan demikian, program telah cukup tepat sasaran. Namun, sebagian petani masih mengharapkan variasi bantuan yang lebih beragam agar dapat disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas yang diusahakan.

3.7 Kendala Pelaksanaan Program

Kendala utama dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan anggaran, keterlambatan penyaluran akibat proses administrasi dan mekanisme pengadaan, serta belum meratanya distribusi karena keterbatasan kuota penerima. Selain itu, kebutuhan petani terhadap sarana produksi cukup tinggi dibandingkan jumlah bantuan yang tersedia dan masih terdapat petani yang belum memahami persyaratan administrasi serta prosedur pengajuan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan agar akses terhadap program lebih mudah dipahami oleh petani.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Program dinilai efektif dalam membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi, mengurangi biaya usaha tani, dan mendukung kegiatan pertanian. Dari aspek efisiensi, mekanisme penyaluran telah mengikuti prosedur, meskipun masih terdapat keterlambatan akibat proses administrasi dan pengadaan. Aspek kecukupan dan pemerataan belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan anggaran dan kuota penerima. Responsivitas pelaksana tergolong baik melalui komunikasi dan pendampingan kepada petani, sedangkan aspek ketepatan menunjukkan bahwa bantuan telah diberikan kepada kelompok tani yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kebutuhan usaha tani. Kendala utama program meliputi keterbatasan anggaran, keterlambatan penyaluran, terbatasnya kuota penerima, tingginya kebutuhan sarana produksi, dan kurangnya pemahaman sebagian petani terhadap prosedur pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran, perbaikan sistem distribusi, perluasan cakupan penerima, penguatan sosialisasi, dan pendampingan agar program dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2018) *Ekonomi Pembangunan Pertanian*. Jakarta: IPB Press.
- Dunn, W.N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W.N. (2018) *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017) *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2017) *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono (2019) *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2015) *Economic Development*. 12th edn. Boston: Pearson.
- Wahab, S.A. (2016) *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, R.K. (2018) *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.